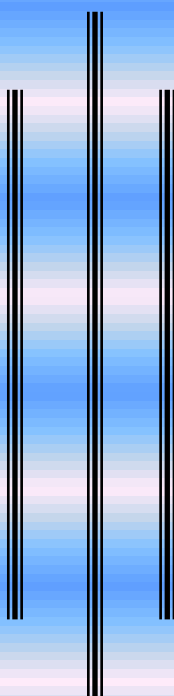




LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019



***PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2019 (*unaudited*) telah selesai disusun, sebagai upaya dalam rangka memenuhi peraturan perundangan-undangan bidang pengelolaan keuangan negara/daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan dilampiri Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja. Laporan Keuangan tersebut disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2019 (*unaudited*) secara teknis administrasi telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2019 (*unaudited*) adalah sebagai berikut, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2019, diketahui bahwa realisasi belanja sebesar Rp.4.554.997.845,- atau mencapai 98,42% dari target anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.4.628.243.500,- Neraca SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2019. Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2019 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 2.931.328.894,82,- Nilai Aset sebesar Rp.2.931.328.894,82,- tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.8.784.600,- Aset Tetap sebesar Rp.2.770.109.227,82,- dan Aset lainnya sebesar Rp.152.435.067,- setelah dikurangi penyusutan aset tetap sebesar Rp(3.629.960.543,05,-) Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.99.351.129,- berupa Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.4.488.354,- dan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 94.862.775,- sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp.2.931.328.894,82,-

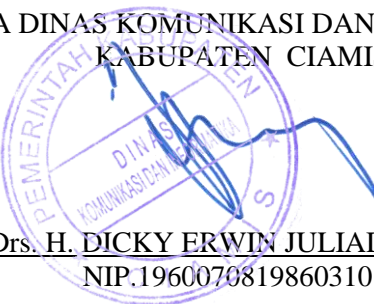
Laporan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan berbagai unsur Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, Surplus/(defisit) Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika periode sampai dengan 31 Desember 2019 ditutup dengan nilai sebesar Rp.4.621.604.785,- yang terdiri dari Beban Belanja Pegawai sebesar Rp.2.469.996.746,- Beban Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.776.551.968,- Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.373.063.724,-

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika tidak menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan SOTK baru. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2019 menyajikan Saldo Akhir Ekuitas sebesar Rp.2.831.977.765,82,- yang diperoleh dari perhitungan Ekuitas Awal sebesar Rp. 3.796.266.605,87 ditambah RKPPKD sebesar Rp. 4.554.997.845,- ditambah RKPPKD Barang sebesar Rp. (897.681.900,05),- ditambah surplus/deficit-LO sebesar Rp. (4.621.604.785) sehingga diperoleh Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.831.977.765,82

Demikian kami sampaikan Laporan Keuangan ini, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan SKPD/PPKD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. DICKY ERWIN JULIADY, M. Si.
NIP.196007081986031012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS ;	

- Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2019.....	v
- Neraca Komparatif Per 31 Desember 2019.....	vii
- Laporan Operasional	viii
- Laporan Perubahan Ekuitas.....	ix
- Catatan Atas Laporan Keuangan.....	x
- DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

1. Lampiran LAKIP

2. Lampiran LRA

a. LRA per Kegiatan

b. LRA per rekening pendapatan dan belanja

3. Lampiran Neraca

3.1. Kas

a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas Per 31 Desember 2019

b. Register Penutupan Kas Per 31 Desember 2019

c. R/C Bank.

d. BKU

3.2. Persediaan

a. Berita acara Pemeriksaan fisik Persediaan

Per 31 Desember 2019.

b. Daftar persediaan Per 31 Desember 2019

3.3. Aset Tetap

- a. Daftar Rekap Aset Tetap Per Satker
- b. Daftar Rekap Aset Per UPB
- c. Daftar Rekap Mutasi Aset Tetap
- d. KIB
- e. KIR

3.4. Aset Lainnya

- a. KIR rusak berat/hilang

4 Lampiran Lainnya

- a. Daftar Setoran Pajak



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2017 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2016 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2019 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;
- n. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- o. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15B Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- p. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019.
- q. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;
- r. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;
- s. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan
- 5.2. Pos – Pos Neraca
- 5.3. Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.4. Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.5. Pos – Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.6. Pos – Pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.7. Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Dalam Penyusunan kebijakan Umum APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 terdapat perubahan asumsi yang perlu diperhatikan dianggap sangat relevan yaitu dari asumsi lainnya dikarenakan asumsi dari laju inflasi dan pertumbuhan PDRB tidak mengalami perubahan dan tetap dengan asumsi pada KUA murni Tahun 2019.

Perubahan asumsi dasar dalam Kebijakan Umum APBD adalah terkait dengan perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan daerah.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan Negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna menjaga stabilitas Sosial Politik. Peran keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana.

Dikarenakan semakin kompleknya persoalan yang dihadapi daerah pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, peranan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih baik, nyata dan bertanggungjawab. Keuangan diarahkan untuk meningkatkan stuktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Kebijakan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa klasifikasi belanja adalah berdasarkan urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada Tahun 2019 terbagi atas Non Urusan dan Urusan Pilihan. Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2019 ini melaksanakan 8 program dan 42 kegiatan. Adapun perincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik,air,telepon dan internet
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk kebutuhan Dinas
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan
5	Penyediaan Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor.
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur Dinas
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan makan dan minuman untuk keperluan Dinas
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
9	Rapat-rapat Koordinasi di dalam Daerah	Terfasilitasinya rapat koordinasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terfasilitasinya perlengkapan gedung kantor
11	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor
12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor
13	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan administrasi kantor
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terfasilitasinya biaya pemeliharaan gedung kantor
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kegiatan administrasi kantor

16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya biaya perawatan kendaraan dinas.
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terfasilitasinya pemeliharaan peralatan gedung kantor.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur		
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya untuk mengikuti bintek / pelatihan formal.
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
20	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersajinya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran TA,2019.
21	Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan SKPD	Tersusunnya dokumen RKA, DPA, PRKA dan DPPA Tahun 2019.
22	Penyediaan Administrasi Pengelola Keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan PA,KPA.,PPK SKPD,BP dsb
23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-
24	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan TA 2019
25	Penyusunan Rencana Strategis	Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis TA 2019
Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa		
26	Pemeliharaan Alat Relay TV	Terpeliharanya daya guna Relay TV
27	Pembinaan KIM	Terlaksananya pembinaan dan pendataan KIM
28	Operasionalisasi Web Site Kabupaten Ciamis	Tersedianya biaya operasionalisasi web site Kabupaten Ciamis
29	Operasionalisasi LPSE	Tersedianya biaya operasionalisasi LPSE.
30	Penyebarluasan Informasi melalui Media Tradisional Pertunjukan Rakyat	Terlaksananya Pertunjukan Rakyat
31	Penyebarluasan Informasi melalui Media Interpersonal (Ceramah,Diskusi).	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi melalui media Interpersonal
32	Peningkatan Sarana Prasarana LPSE	Terlaksananya penyempurnaan sarana dan prasarana LPSE.

33	Monitoring dan Evaluasi Infratraktur Telematika	Terlaksananya monitoring dan evaluasi.
34	Sosialisasi Keamanan Informasi	Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Informasi.
35	Pengembangan Aplikasi	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		
36	Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Sport di Radio dan Televisi (Daerah)	Terlaksananya Penyebaran Informasi
37	Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruangan (leaflet,spanduk,baliho dll)	Terlaksananya Penyebaran Informasi melalui Media Luar Ruangan.
38	Pembentukan LPPL Radio	Terlaksananya Pembentukan LPPL
Program Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah		
40	Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis	Tersusunnya buku data harga Konsumen di Kabupaten Ciamis.
41	Pendataan Analisis Nilai Tukar Petani	Tersusunnya buku Analisis Nilai Tukar Petani
42	Pedataan Perkembangan Ekonomi Per Triwulan	Tersusunnya Buku PE Triwulan



BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

3.1.2.1 *Pendapatan*

3.1.2.2 *Belanja*

3.1.2.3 *Pembiayaan*

3.1.3 Rasio Pos-pos Pendapatan Daerah

3.1.3.1 *Rasio Pendapatan Asli Daerah*

3.1.3.2 *Rasio Pendapatan Transfer*

3.1.3.3 *Rasio Lain-lain Pendapatan Yang Sah*

3.1.4. Rasio pos-pos Belanja Daerah

3.1.4.1 *Rasio-rasio Belanja Operasi*

3.1.4.2 *Rasio-rasio Belanja Modal*

3.1.4.3 *Rasio Belanja Tak Terduga*

3.1.4.4 *Rasio Belanja Transfer*

3.1.4.5. *Rasio-rasio menurut Fungsi Keuangan Negara*

3.1.5 Derajat Kemandirian Daerah

3.1.5.1 *Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan+Pinjaman Daerah*

3.1.5.2 *PAD terhadap Total Belanja*

3.1.5.3 *PAD terhadap Total Belanja Operasi*

3.1.5.4 *PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja*

3.1.5.5 *PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja Operasi*

3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan realisasi dan rencana kinerja keuangan yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2019

Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 diketahui realisasi belanja sebesar Rp. 4.554.997.845,- atau 98,42% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 4.628.243.500,- dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.73.245.655,- atau 1,58%

3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode.

Perbandingan Realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun ini dan Tahun sebelumnya yaitu Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2018 dapat di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :

2018			2019		
Pagu Anggaran	Realisasi	Prosentase	Pagu Anggaran	Realisasi	Prosentase
4.759.760.000,-	4.742.591.081,-	99,64%	4.628.243.500,-	4.554.997.845,-	98,42%

3.1.2.2 Belanja.

1. Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 4.253.656.385,- atau 98,42% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 4.253.656.385,-
2. Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 301.341.460,- atau 98,41% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 306.217.750,-

3.1.4 Rasio Pos-Pos Belanja Daerah.

3.1.4.1 Rasio-rasio Belanja Operasi

No.	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{4.253.656.385,00}{4.554.997.845,00} \times 100 \% =$	93,38	99,69	
2.	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{2.466.730.075,00}{4.554.997.845,00} \times 100 \% =$	54,15	54,38	
3.	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{2.466.730.075,00}{4.253.656.385,00} \times 100 \% =$	57,99	54,55	
4.	$\frac{\text{Belanja Barang Jasa}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{1.786.926.310,00}{4.554.997.845,00} \times 100 \% =$	39,23	45,31	
5.	$\frac{\text{Belanja Barang Jasa}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{1.786.926.310,00}{4.253.656.385,00} \times 100 \% =$	42,01	45,45	

Dari total realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 4.554.997.845,- paling besar terserap oleh realisasi Belanja Operasi yaitu sebesar 93,38% sedangkan sisanya terserap oleh

realisasi belanja modal sebesar 6,62%. Dari realisasi belanja operasional sebagian besar terserap oleh realisasi belanja barang jasa sebesar 39,23% dan sisanya diserap oleh belanja pegawai sebesar 54,15%.

3.1.4.2 Rasio-rasio Belanja Modal.

No.	Rasio-rasio Belanja Modal	Rumus	nilai 2019	nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{301.341.460,00}{4.554.997.845} \times 100 \%$	6,62	0,31	
2.	$\frac{\text{Belanja Modal Tanah}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{-}{301.341.460,00} \times 100 \%$	-	-	
3.	$\frac{\text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{301.341.460,00}{301.341.460,00} \times 100 \%$	100	100	
4.	$\frac{\text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{0}{301.341.460,00} \times 100 \%$	-	-	
5.	$\frac{\text{Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{-}{301.341.460,00} \times 100 \%$	-	-	
6.	$\frac{\text{Belanja Modal Aset Lainnya}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{-}{301.341.460,00} \times 100 \%$	-	-	

Dari total realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 4.554.997.845,- terserap oleh realisasi Belanja Modal sebesar 6,62% . Sedangkan dari total realisasi belanja modal Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp301.341.460,- tersebut paling besar terserap oleh realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar 100%, realisasi Belanja Modal Jalan dan Irigasi sebesar dan Bangunan yaitu sebesar 0%, oleh realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan 0% artinya tidak ada Realisasi untuk belanja Modal Jalan dan Irigasi sebesar dan Bangunan .

3.1.6 Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Keberhasilan yang dicapai
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	684.713.950	672.679.260	
1	Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya dan listrik	294.893.200	283.169.331	Terserapnya dana sebesar 96% dan terfasitasinya jasa Komunikasi, SDA, listrik dan internet.
2.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	67.800.000	67.500.000	Terserapnya dana sebesar 99,6 % dan terpeliharanya kebersihan kantor selama 12 bulan
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.250.760	29.250.760	Terserapnya dana sebesar 100% dan terpenuhinya ATK Dinas selama 12 bulan

4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.380.000	7.380.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
5	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	2.700.000	2.700.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersedianya alat listrik selama 12 bulan
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan terfasilitasinya bahan bacaan untuk pegawai
7	Penyediaan Makan dan Minuman	58.282.500	58.282.500	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersedianya makan dan minuman selama 12 bulan
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	211.907.490	211.896.669	Terserapnya dana sebesar 100% dan terfasilitasi-nya rapat dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan
9	Rapat-rapat koordinasi di Dalam Daerah	5.000.000	5.000.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan terfasilitasinya rapat-rapat dalam daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244.905.050	244.902.800	
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	2.000.000	2.000.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersedianya perlengkapan kantor
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.500.000	1.500.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersedianya peralatan gedung kantor
12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000	4.000.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan dan tersedianya perlengkapan kantor
13	Pengadaan Peralatan Kantor	38.367.750	38.367.750	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersedianya peralatan kantor
14	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	29.900.000	29.900.000	Terserapnya dana sebesar 100 % dan terfasilitasinya pemeliharaan Gedung kantor

15	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	165.137.300	165.135.050	Terserapnya dana sebesar 100% dan terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan dinas
16	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	2.000.000	2.000.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan terfasilitasinya pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor
17	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Kantor	2.000.000	2.000.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan terfasilitasinya pemeliharaan peralatan kantor
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000	-	
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000	-	Dana tidak terserap
IV	Program Peningkatan Pengemb Sistem Pelaporan Kinerja & Keuangan	47.500.000	47.115.000	
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000	4.100.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersajinya dokumen Lap Capaian Kinerja TA 2019
20	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2.620.000	2.620.000	Terserapnya dana sebesar Rp.100% dan tersajinya dokumen Lap Keuangan Semesteran Tahun 2019
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.600.000	4.600.000	Terserapnya dana sebesar Rp.100% dan tersajinya dokumen Lap Keuangan Akhir Tahun Tahun 2019
22	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	5.650.000	5.650.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersajinya Laporan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019.
23	Penyusunan Rencana Strategis	16.130.000	16.130.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersajinya Laporan Rencana Strategis Tahun 2019.
24	Penyediaan Administrasi Pengelola Keuangan	8.000.000	7.615.000	Terserapnya dana sebesar 95,2% dan terfasilitasinya Administrasi Pengelola

				Keuangan
25	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	6.400.000	6.400.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersajinya Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019.
V	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	324.665.000	324.484.920	
26	Pemeliharaan Alat Relay TV	7.490.000	7.490.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan terlaksananya Pemeliharaan Alat Relay TV
27	Pembinaan KIM	31.095.000	31.095.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan terlaksananya kegiatan Pembinaan KIM.
28	Operasionalisasi Web Site Kabupaten Ciamis	181.500.000	181.360.000	Terserapnya dana sebesar 99,9% dan dan berfungsinya website Kabupaten Ciamis.
29	Operasionalisasi LPSE	34.500.000	34.500.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan dan tersedianya biaya operasionalisasi LPSE.
30	Penyebarluasan Informasi melalui Media Tradisional Pertunjukan Rakyat	7.840.000	7.840.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersampainya informasi melalui Pertunjukan Rakyat.
31	Penyebarluasan Informasi melalui Media Interpersonal (Ceramah, Diskusi)	10.440.000	10.440.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersampainya informasi melalui Melalui Media Interpersonal.
32	Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Telematika	17.500.000	17.500.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Telematika.
33	Pengembangan Aplikasi	20.000.000	19.959.920	Terserapnya dana sebesar 98,8% dan meningkatnya keamanan informasi
34	Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE	14.300.000	14.300.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan meningkatnya sarana dan prasarana.

VI	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	40.000.000	39.750.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan terfasilitasinya penyebaran informasi.
35	Sosialisasi Keamanan Informasi	20.000.000	20.000.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersampainya informasi kepada masyarakat.
36	Pembangunan Infrastruktur Keamanan Informasi	20.000.000	19.750.000	Terserapnya dana sebesar 98,75% dan terfasilitasinya kegiatan tsb.
VII	Program Pengembangan Data /Informasi /Statistik Daerah	553.291.000	553.260.000	
37	Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis	145.232.000	145.232.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersedianya data Harga Konsumen.
38	Pendataan Analisis Nilai Tukar Petani	142.699.000	142.699.000	Terserapnya dana sebesar 98,75% dan tersedianya data Analisa Nilai Tukar Petani.
39	Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulan	265.360.000	265.329.000	Terserapnya dana sebesar 99,98% dan tersedianya data Perkembangan Ekonomi Triwulanan.
VII	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	234.067.000	224.370.790	
40	Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Spot di Radio dan Televisi (Daerah)	8.090.000	8.090.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersampainya informasi kepada masyarakat melalui Radio dan Televisi.
41	Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang (Leaflet, Spanduk, Baliho dll)	7.435.000	7.435.000	Terserapnya dana sebesar 100% dan tersampainya informasi kepada masyarakat melalui Leaflet, Spanduk, Baliho, dll.
42	Pembentukan LPPL Radio	218.542.000	208.845.790	Terserapnya dana sebesar 95,56% dan tersalurkannya anggaran untuk persiapan pembentukan LPPL Radio di Tahun 2020.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sudah mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut bahwa pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Ciamis menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*).
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*).
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Ciamis adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019).
- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
- 6) Kas
 - Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
 - Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
 - Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.
- 7) Piutang
 - Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

- Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
- Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
- Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.

8) Persediaan

- Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat
- Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Jenis-jenis persediaan :
 - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
 - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*.
 - Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan
 - Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lainn sebagainya.

9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.

10) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asetb tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut.
- Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ciamis bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional.
- Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

11) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

12) Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada fihak ketiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Ciamis. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Tim Teknis/Bank Jabar.

13) Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari:

➤ Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat.

Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

➤ Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.

➤ Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.

- Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada *Lender* melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.
- Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
- *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

14) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

➤ Utang kepada Pemerintah.

Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.

➤ Utang Bunga Jangka Panjang.

Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

15) Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

16) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

17) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

18) Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

19) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.

20) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.
- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
- 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan.
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Ciamis pada satu periode akuntansi.
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ciamis namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
- 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
- 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Ciamis setelah periode akuntansi berjalan.
- 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

- 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga.
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional,

kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Neraca Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2019. Neraca Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2019 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp.2.931.328.894,82,- Nilai Aset sebesar Rp.2.931.328.894,82,- tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.8.784.600,- Aset Tetap sebesar Rp.2.770.109.227,82,- dan Aset lainnya sebesar Rp.152.435.067,-. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.99.351.129 , -dan Ekuitas sebesar Rp.2.831.977.765,82,- sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.931.328.894,82,-

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sampai dengan 31 Desember 2019, diketahui bahwa realisasi belanja daerah sebesar Rp. 4.554.997.845,- atau mencapai 98,42% dari target anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.4.628.243.500,-

Berdasarkan Laporan Operasional SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyajikan berbagai unsur Beban-LO dan Surplus/defisit-LO yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Surplus/defisit Operasional SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2019 ditutup dengan nilai sebesar Rp (4.621.604.785,-). dari jumlah Beban-LO sebesar Rp. 4.621.604.785,- sehingga terdapat Surplus//defisit-LO sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp(4.621.604.785,-).

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika. per 31 Desember 2019 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 2.831.977.765,82,- Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp. 2.831.977.765,82,- diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp. 3.796.266.605,87 RK PPKD sebesar Rp. 4.554.997.845,- RK PPKD Barang sebesar (Rp. 897.681.900,05),- ditambah Surplus/defisit-LO sebesar (Rp. 4.621.604.785,-) sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.831.977.765,82,-

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

5.2. POS-POS NERACA

5.2.1. ASET		
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.1 ASET LANCAR	Rp.8.784.600,-	Rp.0,-

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.8.784.600,- sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,- Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.784.600,- terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 8.784.600,-.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,- sedangkan nilai saldo per per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0,- atau Nihil, Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan kas (*cash opname*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang sampai dengan akhir periode pelaporan per 31 Desember 2019.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.1.5. PERSEDIAAN		Rp.8.784.600,-	Rp.0,-

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.8.784.600,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,- Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.8.784.600,- merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2019, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2018	Penambahan (Jan s/d Des)	Pengurangan (Jan s/d Des)	Saldo per 31 Desember 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persediaan Habis Pakai	-	29.250.760	20.466.160	8.784.600
2.	Persediaan Tak Habis Pakai	-	-	-	-
3.	Persediaan Untuk Diserahkan/Dijual	-	-	-	-
	Jumlah Persediaan	-	29.250.760	20.466.160	8.784.600

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.1.5.a.	Persediaan Habis Pakai	8.784.600,-	0,-

Saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2019 Rp.8.784.600,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,- Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock opname yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor dan sebagainya. Saldo Persediaan habis pakai yang berupa alat tulis kantor terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

5.2.1.3. ASET TETAP			
		31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Aset Tetap sebelum Penyusutan	Rp. 6.400.069.770,87,-	Rp. 8.120.054.102,87,-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp. (3.629.960.543,05,-)	Rp. (4.223.050.630,-)
	Aset Tetap setelah Penyusutan	Rp. 2.770.109.227,82,-	Rp. 3.887.003.472,87,-

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.770.109.227,82,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.887.003.472,87,- Mutasi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

NO.	U R A I A N	J U M L A H	K E T.
1	2	3	4
	Saldo Awal Aset Tetap Per 31 Desember 2018	8.120.054.102,87	
1).	Mutasi Penambahan :		
a.	Realisasi Belanja Modal	301.341.460,00	
b.	Hibah yang diterima	-	
c.	Koreksi Penambahan :		
-	Perolehan aset tetap dari non belanja modal	27.000.000,00	
-	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam		
-	Pencatatan aset lama yang belum tercatat (koreksi tambah)	-	
d.	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap	-	
e.	Mutasi Barang antar SKPD/Unit	-	
f.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	-	
2).	Mutasi Pengurangan :	328.341.460,00	
a.	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi dikapitalisasi	-	
b.	Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	-	
c.	Koreksi pengurangan hasil		
-	Pengurangan Barang karena rusak berat dan lapuk	-	
-	Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/doble catat	-	
-	Reklas Menjadi Aset Tidak Berwujud	-	
-	Pengurangan barang krn barang jasa	-	
-	Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	
-	Pengurangan Proses TGR	-	
d.	Mutasi Barang antar SKPD/Unit	2.048.325.792,00	
e.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	-	
		2.048.325.792,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap per 31 Desember 2019	6.400.069.770,87	

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 tersebut diatas terdiri dari ;

DAFTAR IKHTISAR ASET TETAP TAHUN 2019

KODREK	URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO AKHIR per 31 DESEMBER 2019 (UN-AUDITED)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
1.3.1.01.01	Tanah	936.795.000,00	27.000.000,00	-	963.795.000,00
1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	2.683.175.302,87	301.341.460,00	811.938.092,00	2.172.578.670,87
1.3.3.01.01	Gedung dan Bangunan	3.523.588.300,00	-	1.222.905.200,00	2.300.683.100,00
1.3.4.01.01	Jalan Irigasi dan Jaringan	976.395.500,00	-	13.482.500,00	962.913.000,00
1.3.5.01.01	Aset Lainnya	100.000,00	-	-	100.000,00
1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	JUMLAH	8.120.054.102,87	328.341.460,00	2.048.325.792,00	6.400.069.770,87

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.3.a.	Tanah	Rp. 963.795.000,-	Rp. 936.795.000,-

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 963.795.000,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 936.75.000, - atau mengalami penambahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	936.795.000,00
2.	Mutasi Penambahan :	
	Realisasi Belanja Modal	-
	Limpahan dari SKPD	27.000.000,00
	Reklas antar pos aset tetap	-
	Koreksi tambah hasil Inventarisasi	-
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	-
3.	Mutasi Pengurangan	-
	Limpahan ke SKPD	-
	Koreksi kurang karena double catat	-
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	963.795.000,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.3.b.	Peralatan dan Mesin	Rp. 2.172.578.670,87,-	Rp. 2.683.175.302,87,-

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.172.578.670,87,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.683.175.302,87,- Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.172.578.670,87,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	2.683.175.302,87
2.	Mutasi Penambahan	311.141.460,00
	Realisasi Belanja Modal	301.341.460,00
	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	-
	Reklasifikasi dari Belanja barang jasa yang diakui sebagai aset tetap peralatan mesin	-
	Limpahan aset tetap dari SKPD	9.800.000,00
	Limpahan aset tetap peralatan dan mesin dari SKPD	-
	Koreksi tambah hasil inventarisasi	-
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	-
3.	Mutasi Pengurangan	510.596.632,00
	Reklas Barang rusak berat & hilang ke asset lain	-
	Proses TGR karena barang hilang	-
	Reklasifikasi ke Barang Jasa	-
	Dihapuskan sesuai SK PENGHAPUSAN	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Limpahan aset tetap peralatan dan mesin ke SKPD lain	510.596.632,00
	Dihibahkan ke masyarakat	-
	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	-
	Koreksi kurang karena double catat	-
	Koreksi kurang karena tidak masuk batas Kapitalisasi	-
4.	Ssaldo Akhir Per 31 Desember 2017	2.172.578.670,87

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.3.c.	Gedung dan Bangunan	Rp.2.300.683.100,-	Rp. 3.523.588.300,-

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.683.100,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.523.588.300,- Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.683.100,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	3.523.588.300,00
2.	Mutasi Penambahan	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Reklasifikasi dari belanja barang jasa	-
	Limpahan dari SKPD	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Koreksi tambah hasil inventarisasi	-
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	-
3.	Mutasi Pengurangan	1.222.905.200,00
	Reklasifikasi ke ke aset lain-lain karena rusak berat	-
	Reklasifikasi ke Barang Jasa	-
	Dihapuskan sesuai SK PENGHAPUSAN	-
	Reklas antar pos aset tetap	-
	Dilimpahkan ke SKPD	1.222.905.200,00
	Dihibahkan ke masyarakat	-
	Tidak Masuk Kapitalisasi	-
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember 2017	2.300.683.100,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.3.d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 962.913.000,-	Rp. 976.395,500,-

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 962.913.000,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 976.395,500,- Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 962.913.000,- dengan rincian sebagai berikut

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	976.395.500,00
2.	Mutasi Penambahan	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Reklasifikasi ke Belanja barang jasa	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Limpahan dari SKPD	-
3.	Mutasi Pengurangan	13.482.500,00
	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Dilimpahkan ke SKPD	13.482.500,00
	Dihibahkan ke masyarakat	-
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	962.913.000,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.3.e.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.100.000,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000,- atau tidak mengalami penambahan/pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Aset Tetap Lainnya
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	100.000,00
2.	Mutasi Tambahan	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Belanja barang jasa	-
	Reklas antar pos aset tetap	-
	Limpahan dari SKPD	-
3.	Mutasi Pengurangan	-
	Reklasifikasi ke Barang Jasa	-
	Reklas antar pos aset tetap	-
	Dihibahkan ke masyarakat	-
	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	-
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	100.000,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.3.g.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(Rp.3.629.960.543,05,-)	(Rp.4.233.050.630,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp.3.629.960.543,05,-) sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.4.233.050.630,-) Kebijakan akuntansi tentang aset tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap induk, termasuk juga penggabungan atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. Hampir sebagian besar SKPD telah melaksanakan penggabungan atas seluruh pengadaan yang sifatnya rehabilitasi atau peningkatan dan meningkatkan masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut termasuk juga penggabungan penghitungan dan penyajian penyusutan aset tetapnya, dengan rincian sebagai berikut;

No.	URAIAN	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tanah	-	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	(2.107.186.155,00)	480.153.225,00		(1.627.032.930,00)
3.	Gedung dan Bangunan	(1.208.300.952,00)	123.259.033,00	-	(1.085.041.919,00)
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	(917.563.523,00)	-	(322.171,05)	(917.885.694,05)
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	(4.233.050.630,00)	603.412.258,00	(322.171,05)	(3.629.960.543,05)

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.2. KEWAJIBAN	Rp.99.351.129,-	Rp.97.674.200,-

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 99.351.129,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 97.674.200,- Kewajiban tersebut dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 99.351.129,-

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 99.351.129,-	Rp.97.674.200,-

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 99.351.129,- sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 97.674.200,- Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 99.351.129,- merupakan bagian utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan yaitu dari utang belanja pegawai untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan Januari 2020 dan utang belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik dan sebagainya pada bulan Januari 2020 yang manfaat ekonomis penggunaan jasa kantor tersebut telah dinikmati pada bulan Desember 2019.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK 8.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2.2.1.d. Utang Belanja	Rp.99.351.129,-	Rp.97.674.200,-

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 99.351.129,- sedangkan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 97.674.200,- Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 99.351.129 dan merupakan utang belanja Pegawai dan utang belanja

barang dan jasa yang bersifat untuk kegiatan operasional seperti belanja jasa kantor untuk pembayaran telepon, air, listrik dan sebagainya pada bulan Januari 2020 yang manfaat ekonomis penggunaan jasa kantor tersebut telah dinikmati pada bulan Desember 2019.

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	97.674.200,00	
2	Pembayaran utang tahun 2018	97.674.200,00	
3	Utang Belanja Pegawai	94.862.775,00	
4	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.488.354,00	
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2017	99.351.129,00	

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.3. EKUITAS	Rp.2.831.977.765,82,-	Rp.3.796.266.605,87,-

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.831.977.765,82,- sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.796.266.605,87,- Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.831.977.765,82,- merupakan hasil perhitungan RK PPKD, RK PPKD Barang ditambah Surplus/defisit-LO, dengan rincian sebagai berikut ;

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2018	3.796.266.605,87	
2.	RK PPKD	4.554.997.845,00	
3.	RK PPKD Barang	(897.681.900,05)	
4.	Surplus/defisit-LO	(4.621.604.785,00)	
5.	Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017	2.831.977.765,82	

5.3. POS-POS BELANJA- LRA

Struktur Belanja dalam APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2019 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negrei Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2.1 Belanja Operasi- LRA

Realisasi Belanja Operasi – LRA periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 4.253.656.385,- atau mencapai 98,42% dari anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.742.591.081,-

	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	2.512.631.500,00	2.466.730.075,00	98,17	2.578.908.969,00	99,50
2	Belanja Barang dan Jasa	1.809.394.250,00	1.786.926.310,00	98,76	2.148.827.112,00	99,81
	Jumlah	4.322.025.750,00	4.253.656.385,00	98,42	4.727.736.081,00	99,66

5.3.2.1.1 Belanja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.466.730.075,- atau mencapai 98,17% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.512.631.500,-

5.3.2.1.2. Belanja Barang Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.786.926.310,- atau mencapai 98,76% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.809.394.250,-

5.3.2.2. Belanja Modal – LRA

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 301.341.460,- atau mencapai 98,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 306.217.750,- dengan rincian sebagai berikut;

No.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA MODAL					
1.	Belanja Tanah	-	-		-	-
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	306.217.750,00	301.341.460,00	98,41	14.855.000,00	100,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH	306.217.750,00	301.341.460,00	98,41	14.855.000,00	100,00

Dari total realisasi belanja modal Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 301.341.460,- tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.2.2.1. Belanja Modal Tanah- LRA

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2019 sebesar Rp.0,- atau tidak ada perubahan.

5.3.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Mesin- LRA

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2019 sebesar Rp.301.341.460,- atau sebesar 98,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.306.217.750,-

5.3.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,- atau tidak ada perubahan.

5.3.2.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan- LRA

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun 2019 sebesar Rp.0,- atau tidak ada perubahan.

5.5. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.5.2. Beban – LO

Realisasi Laporan Operasional sebesar Rp.4.621.604.785,- terdiri dari Realisasi Beban Operasional-LO Beban Pegawai sebesar Rp. 2.469.996.746,- dan Realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.776.551.968,- dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 373,063,724,- Sedangkan realisasi Belanja- LRA diluar belanja Modal adalah sebesar Rp. 4.253.656.385,- terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.2.466.730.075,- dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.786.926.310,- apabila dibandingkan antara realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp. 4.253.656.385,- dengan realisasi Belanja Operasional-LO sebesar Rp. 4.621.604.785,- terdapat selisih lebih besar belanja Operasional-LO sebesar Rp. 367.948.400,- disebabkan adanya tambahan beban utang belanja jasa kantor pada bulan Januari 2020 dan belanja pegawai untuk bulan Januari 2020 dan adanya

pengakuan beban persediaan SKPD dari Saldo Persediaan bulan lalu yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan SKPD dalam tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.	BEBAN -LO						
9.1.	BEBAN OPERASIONAL-LO	2.448.435.075,00	342.473.835,00	90.096.104,00	5.070.240.510,00		
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	2.448.435.075,00	94.862.775,00	91.596.104,00	2.460.996.746,00		
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO			(1.500.000,00)			
9.1.3.	BEBAN JASA - LO		16.800.938,00				
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO		-	-			
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	280.808.566,00	-		280.808.566,00		
9.1.6.	BEBAN SUBSIDI - LO	-	-	-	-		
9.1.7.	BEBAN HIBAH - LO	-	-	-	-		
9.1.8.	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	-	-	-	-		
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO		230.810.122,00	-	230.810.122,00		
9.1.10.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG - LO	-	-	-	-		
9.1.11.	BEBAN LAIN-LAIN - LO	-	-	-	-		
9.2.	BEBAN TRANSFER - LO	-	-	-	-		
9.2.1.	BEBAN TRANSFER BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA - LO	-	-	-	-		
9.2.2.	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - LO	-	-	-	-		
9.3.	DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	-		-			
9.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN ASET - LO	-		-			
	JUMLAH BEBAN - LO	4.253.656.385,00	247.611.060,00	90.096.104,00	4.621.604.785,00		

5.5.2.1. Beban Operasional- LO

Beban Operasional – LO terdiri dari;

5.5.2.1.a Beban Pegawai – LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.469.996.746,- atau lebih kecil dibandingkan realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.466.730.075,- yang disebabkan adanya transaksi pelunasan maupun penambahan utang belanja selama tahun 2019.

dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA ADANYA PENGAKUAN UTANG	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN UTANG	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	2.466.730.075,00	94.862.775,00	440.171.604,00	2.469.996.746,00	2.670.280.494,00
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.356.976.533,00	-	91.596.104,00	1.265.380.429,00	1.432.471.555,00
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.091.458.542,00	94.862.775,00		1.186.321.317,00	1.233.308.939,00
9.1.1.03.	Honorarium Non PNS - LO	18.295.000,00		348.340.500,00	-	-
9.1.1.07.	Beban Uang Lembur - LO		-	235.000,00	18.295.000,00	4.500.000,00
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO	2.466.730.075,00	94.862.775,00	440.171.604,00	2.469.996.746,00	2.670.280.494,00

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa terdapat pengakuan pengurangan dan penambahan utang belanja pegawai pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika berupa kekurangan belanja pegawai yang harus dibayarkan pada tahun 2019.

5.5.2.1.b. Beban Persediaan – LO.

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.192.568.160,- atau lebih kecil Rp. 8.784.600,- jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Persediaan-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp.201.352.760,- yang disebabkan adanya pengurangan akibat masih terdapatnya persediaan pada akhir tahun yang belum digunakan dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA ADANYA SALDO AWAL	PENGURANGAN KARENA ADANYA SALDO AKHIR BERDASARKAN STOCK OPNAME	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO					
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis - LO	40.516.760,00		(8.784.600,00)	31.732.160,00	57.729.500,00
9.1.2.02.	Beban Bahan/Material - LO	450.000,00		-	450.000,00	10.050.000,00
9.1.2.03.	Beban Cetak dan Penggandaan - LO	67.051.000,00	-	-	67.051.000,00	63.464.000,00
9.1.2.04.	Beban Makan dan Minuman - LO	92.745.000,00	-	-	92.745.000,00	106.390.750,00
9.1.2.05.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - LO	-	-	-	-	-
9.1.2.06.	Beban Perlengkapan Komputer - LO	590.000,00	-	-	590.000,00	-
9.1.2.07.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - LO		-	-	-	
9.1.2.08.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO			-	-	
9.1.2.09.	Beban Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	-	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN - LO	201.352.760,00	-	(8.784.600,00)	192.568.160,00	237.634.250,00

5.5.2.1.c. Beban Jasa – LO

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.029.893.089,- atau lebih Kecil Rp.1.589.742,- jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.031.482.831,- yang disebabkan adanya pengurangan saldo utang jasa kantor tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA PENGAKUAN HUTANG BARU	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN HUTANG	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)
9.1.3.	BEBAN JASA - LO	1.051.232.831,00	-	-	1.049.643.089,00
9.1.3.01	Beban Jasa Kantor - LO	369.169.331,00	4.488.354,00	6.078.096,00	367.579.589,00
9.1.3.02	Beban Premi Asuransi - LO	-	-	-	-
9.1.3.03	Beban Jasa Konsultasi - LO	-	-	-	-
9.1.3.04	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	290.573.000,00	-	-	290.573.000,00
9.1.3.05	Beban Beasiswa Pendidikan PNS - LO	-	-	-	-
9.1.3.06	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - LO	-	-	-	-
9.1.3.07	Beban Beasiswa Pendidikan - LO	-	-	-	-
9.1.3.08	Beban Honorarium PNS - LO	-	-	-	-
9.1.3.09	Beban Honorarium Non-PNS - LO	348.340.500,00	-	-	348.340.500,00
9.1.3.10	BebanLO	-	-	-	-
9.1.3.11	Beban Pegawai BLUD - LO	-	-	-	-
9.1.3.12	Beban Barang Jasa BLUD - LO	-	-	-	-
9.1.3.13	Beban Uang Saku/Transportasi Peserta - LO	23.400.000,00	-	-	23.400.000,00
9.1.3.14	Beban Pengembangan Program Aplikasi - LO	19.750.000,00	-	-	19.750.000,00
9.1.3.15	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LO	-	-	-	-
9.1.3.16	Beban Sewa Sarana Mobilitas - LO	-	-	-	-
9.1.3.17	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LO	-	-	-	-
9.1.3.18	Beban Transportasi Raskin - LO	-	-	-	-
9.1.3.19	Beban Operasional Sekolah (BOS) dan Bansos Pusat Bidang Pendidikan - LO	-	-	-	-
	JUMLAH	1.051.232.831,00	4.488.354,00	6.078.096,00	1.049.643.089,00

Dari tabel tersebut di atas terlihat adanya pengurangan pengakuan saldo utang belanja jasa kantor bulan lalu sebesar Rp. 1.589.742,- untuk membayar listrik, telepon dan air yang manfaatnya telah dinikmati pada bulan Desember 2019 tetapi harus dibayar pada tahun 2020 namun telah di limpahkan beban tersebut kepada SKPD lain.

5.5.2.1.d. Beban Pemeliharaan - LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.204.125.050,- atau sama dengan realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp.204.125.050,- disebabkan tidak adanya transaksi pelunasan maupun penambahan utang belanja pemeliharaan selama tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut;

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA SALDO UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO					
9.1.4.01.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi - LO	-	-	-	-	-
9.1.4.02.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor - LO	165.135.050,00	-	-	165.135.050,00	156.772.300,00
9.1.4.03.	Beban Perawatan Peralatan/ Perlengkapan Kantor - LO	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00	45.500.000,00
9.1.4.04.	Beban Perawatan Bangunan Gedung - LO	29.900.000,00	-	-	29.900.000,00	18.400.000,00
9.1.4.05.	Beban Perawatan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor - LO	-	-	-	-	-
9.1.4.06.	Beban Perawatan Peralatan Laboratorium - LO	-	-	-	-	-
9.1.4.07.	Beban Pemeliharaan Sarana Persampahan - LO	-	-	-	-	-
9.1.4.08.	Beban Perlengkapan Komputer - LO	-	-	-	-	-
9.1.4.09.	Beban Perlengkapan Gedung Kantor - LO	-	-	-	-	-
	JUMLAH	203.535.050,00	-	-	204.125.050,00	220.672.300,00

5.5.2.1.e. Beban Perjalanan Dinas – LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.330.836.669,- atau lebih besar dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp.330.847.490,- disebabkan adanya transaksi pelunasan maupun pengurangan utang belanja perjalanan dinas selama tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA SALDO UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO					
9.1.5.01.	Beban Perjalanan Dinas - LO					
9.1.5.01.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah - LO	22.470.000,00	-	-	22.470.000,00	
9.1.5.01.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah - LO	308.377.490,00	-	10.821,00	308.366.669,00	
	JUMLAH	330.847.490,00	-	10.821,00	330.836.669,00	-

5.5.2.1.i Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.373.063.724,- sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas

nilai satu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
9.1.9.01.	BEBAN PENYUSUTAN		371.014.056,00		371.014.056,00	
9.1.9.01.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		299.772.018		299.772.018	351,911,889.00
9.1.9.01.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		68.599.100	-	68.599.100	70,471,766.00
9.1.9.01.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	1.979.395	-	1.979.395	1,979,396.00
9.1.9.01.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
9.1.9.01.05.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	663.543,00	-	663.543,00	-
9.1.9.02.	BEBAN AMORTISASI	-	2.049.668,00	-	2.049.668,00	1.892.000,00
9.1.9.02.01.	Beban Amortisasi	-	2.049.668,00	-	2.049.668,00	1.892.000,00
	JUMLAH	-	373.063.724,00	-	373.063.724,00	426,255,051.00

5.7. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika. per 31 Desember 2019 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 2.831.977.765,82,- Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp. 2.831.977.765,82,- diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp. 3.796.266.605,87 RK PPKD sebesar Rp. 4.554.997.845,- RK PPKD Barang sebesar (Rp. 897.681.900,05),- ditambah Surplus/defisit-LO sebesar (Rp. 4.621.604.785,-) sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.831.977.765,82,- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

REK	URAIAN	2019	2018	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ekuitas Awal	3.796.266.605,87	4.289.138.201,88	
	RK PPKD	4.554.997.845,00	4.742.591.081,00	
	RK PPKD Barang	(897.681.900,05)		
	Surplus/Defisit-LO	(4.621.604.785,00)	(5.236.364.394,00)	
	Koreksi Kesalahan - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		901.716,99	-
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.831.977.765,82	3.796.266.605,87	

1.7.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2019 diperoleh dari Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2018 sebesar Rp.3.796.266.605,87 dengan rincian sebagai berikut :

REK	URAIAN	2018	KET
(1)	(2)	(4)	(5)
	Ekuitas Awal	4.289.138.201,88	
	RK PPKD	4.742.591.081,00	
	RK PPKD Barang		
	Surplus/Defisit-LO	(5.236.364.394,00)	
	Koreksi Kesalahan - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	901.716,99	-
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	3.796.266.605,87	

1.7.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp.4.621.604.785) Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional dimana diperoleh dari Beban-LO sebesar Rp. Rp.4.621.604.785,- dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional per 31 Desember 2019.

◆ RK PPKD Rp. 4.554.997.845,-

Merupakan total realisasi belanja UYHD Dinas Komunikasi dan Informatika untuk TA.2019 yang telah diterima dari BUD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi Program dan Kegiatan selama 1(satu) tahun yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sbb:

Belanja Operasi periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.554.997.845,- yang terdiri dari ;

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.466.730.075,-
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.786.926.310,-

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 301.341.460,- Dengan jumlah total sebesar Rp. 4.554.997.845,-.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Sebagai tindaklanjut dari PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka lembaga structural yang menangani Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Perda Nomor 17 Tahun 2008 dan untuk oprasionalnya difasilitasi dengan dana APBD Kabupaten Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai asas otonomi daerah pembantuan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Program

c. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

1. Seksi Informasi Publik
2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi

d. Bidang Telematika dan Persandian

1. Seksi Persandian
2. Seksi Telematika

e. Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik

1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik
2. Seksi Analisa Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik dan Data Elektronik

Data Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

- Esselon II : 1 orang
- Esselon III : 4 orang
- Esselon IV : 8 orang
- Pelaksana : 9 orang

Data Pegawai per Golongan :

- GOL IV : 5 orang
- GOL III : 13 orang
- GOL II : 4 orang



BAB VII PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika T.A 2019 disusun dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

CALK ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami juga oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen etintas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya CALK ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan lingkup SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ciamis, Januari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**

Drs. H. DICKY ERWIN JULIADY, M.Si.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196007081986031012



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Jend Sudirman Telpn (0265) 773000 Ciamis 46211

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Akhir Tahun TA 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun TA 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Akhir Tahun TA 2019 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019 secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Ciamis, Januari 2020

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**



Drs. H. DICKY ERWIN JULIADY, M.Si.
NIP. 196007081986031012